

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjamin keberadaan spesies manusia, tapi perkawinan juga memiliki tujuan untuk memberikan rasa damai, tenang dan tenteram. Dalam surah al-rum ayat 21 dijelaskan tentang bagaimana istri-istri diciptakan agar pasangannya merasakan ketenteraman dan kasih sayang karena mendapatkan anak-anak dari istri-istri tersebut dan sebaliknya perempuan yang menjadi istri juga mendapatkan perlindungan dan nafkah dari laki-laki dengan alasan keduanya saling mencintai.<sup>1</sup>

Dalam hukum Indonesia, tujuan perkawinan sudah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 Tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dari penjelasan di atas kita dapat memahami bahwa poin utama dalam perkawinan adalah untuk memberikan kebahagiaan lahir dan batin kepada yang melakukan dan juga kata kekal dapat berarti perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung selamanya.<sup>3</sup>

Dalam beberapa rumah tangga aspek kekal dalam undang-undang perkawinan tidak dapat terpenuhi karena berbagai hal yang pada akhirnya

---

<sup>1</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Damsyiqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*

<sup>2</sup> Lihat pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia* (Ponorogo : STAIN Po Press, 2015), hlm. 3

pasangan suami istri memilih untuk berpisah dengan jalan perceraian untuk menghindari masalah yang lebih besar. Perceraian dibenarkan dalam hukum islam sebagai solusi bagi rumah tangga yang sudah tidak bisa diselamatkan dan apabila dilanjutkan hanya akan membawa keburukan. Sehingga perceraian adalah solusi terbaik bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar dari masalah rumah tangga.<sup>4</sup>

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda “*tidak (boleh) ada mudarat dan tidak boleh saling mencelakai*”.<sup>5</sup> Hadist ini memiliki arti talak tidak seharusnya di jatuhkan apabila tujuannya untuk menyakiti istri karena hanya akan mendatangkan mudarat, begitu juga sebuah perkawinan yang hanya mendatangkan mudarat sebaiknya tidak dipertahankan. Hukum positif di Indonesia sudah mengatur perceraian sebagaimana dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan berusaha dan gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan perkawinan yang telah dibangun oleh pasangan suami istri. Perceraian dalam fiqh lebih dikenal dengan istilah talak yang berarti melepas ikatan perkawinan dengan mengucapkan kalimat talak dengan sukarela, ucapan talak haruslah diucapkan dengan kata-kata yang jelas atau dapat dengan tersirat kepada

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm 190.

<sup>5</sup> HR. Ahmad dan Ibnu Majah, *Ash-Shahihah*, no. 250

istrinya yang akan diceraikan.<sup>6</sup> Umumnya perceraian terjadi karena suami dan istri sudah merasa tidak cocok antara satu sama lain namun perceraian bisa saja terjadi karena banyak hal. Pada pasal 144 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami kepada istri dan hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di hadapan sidang Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Putusnya perkawinan karena perceraian tidak hanya menyebabkan hilangnya semua hak dan kewajiban dari suami dan istri tapi juga memunculkan kewajiban baru bagi suami dan istri. Sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, setelah bercerai suami dibebankan untuk membayar nafkah idah, mut'ah, maskan dan kiswah selama istri dalam masa idah dan istri berkewajiban untuk menjalankan masa idah dengan tidak melaksanakan pernikahan dalam waktu 3 kali suci. Kewajiban suami untuk membayar nafkah juga ditekankan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Pembayaran nafkah idah sering menjadi masalah tersendiri setelah perceraian karena kurangnya landasan hukum yang menjamin pembayaran nafkah pasca perceraian. Pembayaran nafkah idah berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak perempuan dalam kasus perceraian yang memang belum ada payung hukum yang jelas dan kuat. Sejauh ini peraturan yang memberikan payung hukum kepada perempuan pasca perceraian ada dalam SEMA nomor 1 tahun 2017 huruf C angka 1 yang menjelaskan

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989* (Jakarta : Pustaka Kartini 1993), hlm 230

<sup>7</sup> Lihat pasal 115, *Kompilasi Hukum Islam*

bahwa pembayaran nafkah yang muncul setelah perceraian, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”. Dalam peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa ikrar talak dapat dilaksanakan apabila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar nafkah pasca perceraian.

Namun SEMA tidak dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan lain karena SEMA merupakan peraturan kebijakan yang tidak memiliki bentuk formal seperti peraturan perundang-undangan lain yang memiliki penamaan, pembukaan, batang tubuh hingga penutup.<sup>8</sup> Selain itu obyek utama dari SEMA adalah ketua pengadilan, hakim, panitera dan pegawai atau pejabat dalam lingkup pengadilan dan tidak disebutkan bahwa dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam memutus perkara.

Hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan ketetapan atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri dengan adil yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didapatkan selama proses persidangan. Oleh karena itu dalam penentuan putusan, hakim dituntut untuk berlaku adil dan bijaksana serta harus dapat mempertimbangkan segala aspek termasuk sumber-sumber hukum yang ada dan berlaku dan hakim sebagai yang menjalankan kuasa kehakiman harus patuh terhadap prinsip perilaku hakim yang ada dalam kode etik hakim.

---

<sup>8</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta : Kanisius 1998) hlm 157

Salah satu perilaku hakim yang harus selalu dipertahankan dalam memutus sebuah perkara adalah perilaku adil. Adil bagi seorang hakim berarti hakim harus selalu memberikan hak-hak kepada semua pihak yang berhak serta membebankan kewajiban kepada semua pihak juga sesuai dengan hukum yang berlaku karena asas dalam beracara yang harus diutamakan oleh hakim adalah asas *equality before the law* yang berarti semua orang memiliki posisi yang sama di hadapan hukum, dan untuk mencapai keadilan tersebut seorang hakim juga harus menggali hukum dari berbagai sumber agar dalam mempertimbangkan putusan seorang hakim tidak hanya berpatokan pada satu jenis hukum saja, karena hal ini adalah bentuk dari independensi hakim dalam menyelesaikan perkara.<sup>9</sup>

Meskipun sudah ada peraturan yang memberikan kewenangan bagi hakim untuk menunda pengucapan ikrar talak sebelum pembayaran nafkah pasca perceraian, tapi dalam prakteknya tidak semua putusan perceraian menggunakan peraturan ini (SEMA Nomor 1 Huruf C poin 1). Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang di mana yang ditemukan oleh penulis selama tahun 2020 ada 2609 Putusan yang di dalamnya terdapat amar penundaan pengucapan ikrar talak sebelum pelunasan nafkah idah. Dari sekian banyak putusan penulis mengambil contoh 5 putusan dan dari 5 tersebut hanya ditemukan 2 yang mencantumkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 ke dalam pertimbangan hukumnya sedangkan 3 lainnya hanya menggunakan amar penundaan ikrar talak tanpa

---

<sup>9</sup> *Pedoman Perilaku Hakim*. (Mahkamah Agung RI Pengurus Daerah IKAHI Sumatera Selatan : 2010), hlm 5

menyebutkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 sebagai sumber hukum. posisi SEMA yang tidak setingkat dengan sumber hukum lain seperti peraturan perundang-undangan menjadi salah satu faktor tidak semua hakim menggunakan SEMA sebagai sumber hukum, meskipun SEMA sudah disebutkan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan sebagai peraturan lain yang masih memiliki kekuatan hukum yang berasal dari badan pembuatnya yaitu Mahkamah Agung.

Dalam salah satu putusan pengadilan agama kota malang yaitu putusan nomor 1569/Pdt.G/2020/PA.Mlg, majelis hakim menggunakan amar putusan yang berbunyi “... yang wajib diserahkan kepada termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan”. Amar putus ini merupakan bagian dari amar putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu amar yang menghukum pemohon untuk membayar nafkah idah dan mut’ah kepada termohon. Amar putusan ini sesuai dengan petunjuk yang ada dalam SEMA nomor 1 tahun 2017 huruf c poin 1 dengan tujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk menjamin pembayaran nafkah idah dan mut’ah tetap dilakukan dan dengan amar ini juga hakim dapat menunda sidang pengucapan ikrar talak sebelum nafkah idah dan mut’ah dilunasi oleh pemohon kepada termohon agar putusan dapat dilaksanakan dengan sempurna.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C poin 1 memang mencantumkan peraturan terkait pembayaran nafkah idah namun status

SEMA sebagai peraturan kebijakan menjadi permasalahan tersendiri Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang sudah saya jabarkan di atas maka dalam skripsi ini saya akan membahas tentang penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C poin 1 oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam skripsi dengan judul **“Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C Poin 1 Tentang Penundaan Pengucapan Ikrar Talak Sebelum Pelunasan Nafkah Idah Dalam Pertimbangan Putusan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Putusan Nomor 1569/Pdt.G/2020/PA.Mlg)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang yang sudah dijabarkan di atas maka saya akan menyusun beberapa hal yang akan menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini :

1. Bagaimana penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C Poin 1 dalam pertimbangan hukum putusan nomor 1569/Pdt.G/2020/PA.Mlg ?
2. Apa pengaruh penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C Poin 1 terhadap putusan perkara Nomor 1569/Pdt.G/2020/PA.Mlg ?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang mendasari hakim untuk menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C

Poin 1 dalam pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 1569/Pdt.G/2020/PA.Mlg.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C Poin 1 pada putusan perkara Nomor 1569/Pdt.G/2020/PA.Mlg.

Kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini antara lain :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis-penulis lainnya dalam hal pertimbangan hakim, penerapan SEMA dalam putusan dan juga usaha perlindungan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum

2. Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penegak hukum yang bersangkutan terutama Pengadilan Agama dalam menegakkan hukum dan hak-hak perempuan setelah perceraian

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Penulis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penegakan hak nafkah istri setelah perceraian serta pengaplikasian SEMA dalam pertimbangan putusan hakim
- b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu dan teori-teori yang diterima di bangku perkuliahan di lapangan secara nyata.



c. Untuk memenuhi syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana (S1) dari program studi Akhwal Syakhsiyyah dan studi Ilmu Hukum

2. Bagi masyarakat

Sebagai sumber informasi untuk menambah kesadaran masyarakat luas terutama yang sudah berkeluarga tentang pentingnya jaminan atas nafkah idah dari suami agar hak istri yang seharusnya diterima tidak tercederai karena tindakan suami.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan referensi dan rujukan serta masukan terhadap Pemerintah terutama Pengadilan Agama apabila ditemukan kekurangan dalam regulasi yang berlaku sekarang sehingga dapat diperbaiki agar tercipta hukum yang jelas dan tegas bagi masyarakat luas

**E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Dalam jurnal yang berjudul *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Irwan Adi Cahyadi menyatakan bahwa jika kita melihat dari bentuk semua SEMA maka fungsinya lebih menyerupai peraturan kebijakan jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan atau yang sejenisnya karena SEMA sendiri umumnya ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di Pengadilan. Namun hingga tahun 2014 dari 369 SEMA yang sudah dikeluarkan terdapat 25 SEMA yang dapat dikategorikan sebagai

peraturan dan 344 lainnya termasuk dalam golongan peraturan kebijakan.<sup>10</sup>

Jurnal ini juga membahas tentang peraturan perundang-undangan tentang wewenang membentuk hukum lebih tepatnya dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang memberikan kekuasaan bagi Mahkamah Agung untuk membentuk hukum. kewenangan ini berfungsi agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan perkara yang masih belum diatur secara rinci dalam perundang-undangan Nasional. Peraturan ini tentu tidak dapat diaplikasikan ke dalam semua SEMA, hanya SEMA yang memiliki peraturan terkait dengan hukum acara atau mengisi kekosongan hukum sajalah yang dapat digunakan dengan dasar peraturan ini. Jadi, dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa SEMA bisa saja digunakan sebagai sumber hukum yang valid jika tidak ada hukum lain yang mengatur secara rinci terkait perkara yang ada dan SEMA yang digunakan hanya terbatas pada SEMA yang bersifat sebagai peraturan.<sup>11</sup>

Salah satu poin pembahasan dalam skripsi ini yaitu tentang nafkah idah setelah perceraian juga telah disinggung dalam skripsi dengan judul *Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B* yang ditulis oleh Ade Ilma Auliana. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa baik cerai talak

---

<sup>10</sup> Irwan Adi Cahyadi : “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia” (Malang : Universitas Brawijaya, 2014), hlm 15

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 16

maupun cerai gugat keduanya memiliki beberapa implikasi hukum yang tercantum baik dalam undang-undang atau dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu kewajiban suami untuk memberikan nafkah *idah*, *mut'ah*, dan *hadanah* (jika ada), hal ini juga dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 236, 241 dan ayat 133, Surah Al-ahzab ayat 28 dan 49, serta surah At-thalaq ayat 6 dan 7.<sup>12</sup>

Penelitian ini juga membahas terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah *idah* dan *mut'ah* ketika terjadi perceraian. Hal-hal yang dipertimbangkan oleh hakim yakni adanya gugatan balik/rekonvensi (dalam kasus permohonan) dari istri yang di dalamnya menggugat terkait dengan nafkah *idah*, selain itu juga hakim memeriksa fakta-fakta yang terjadi selama persidangan serta melihat juga kemampuan suami dalam mencari nafkah sehingga putusan yang akan dikeluarkan hakim tidak membebani suami.<sup>13</sup>

Selain 2 penelitian di atas, penulis juga menemukan skripsi lain dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg (Studi di Pengadilan Agama Malang)” yang ditulis oleh Zailani dan dipublikasikan pada tahun 2015. Secara garis besar skripsi ini menulis tentang adanya praktek penundaan sidang ikrar talak di Pengadilan Agama kota Malang dengan alasan adanya gugatan rekonvensi dari istri yang ingin suaminya melunasi tanggungan nafkah *idah* terlebih dahulu sebelum mengucapkan ikrar talak dan resmi

---

<sup>12</sup> Ade Ilma Auliana : “Pemberian Nafkah Idda dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B” (Makassar : UIN Alauddin, 2018), hlm 72

<sup>13</sup> *Ibid*, 73

bercerai dan majelis hakim juga mempertimbangkan hal ini dengan alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat rekonvensi. Penundaan ini bertujuan untuk menghindari adanya eksekusi nafkah idah karena tidak diberikan oleh suami dan untuk melindungi istri dari suami yang tidak bertanggung jawab.<sup>14</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan sidang ikrar talak sudah dilakukan sejak lama oleh hakim Pengadilan Agama kota Malang tapi berdasarkan pada adanya gugatan rekonvensi dari termohon dan setelah adanya SEMA nomor 1 tahun 2017 hakim mendapatkan landasan hukum melakukan penundaan ikrar talak dengan tujuan yang sama.

Poin penelitian yang terdapat dalam 3 penelitian di atas secara garis besar adalah yang akan diteliti oleh penulis namun tersaji secara terpisah dan meskipun penelitian ketiga membahas tentang penundaan sidang ikrar talak tapi penelitian tersebut dibuat sebelum adanya SEMA Nomor 1 tahun 2017 dan PERMA nomor 3 tahun 2017, hal ini menegaskan bahwa penelitian skripsi ini merupakan yang pertama dan belum dilakukan sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif penelitian yang berfokus pada bahan-bahan penelitian tertulis atau bahan pustaka yaitu SEMA Nomor 1 tahun 2017 huruf C poin 1 dan

---

<sup>14</sup> Zailani, "Pertimbangan Hakim Dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg (Studi di Pengadilan Agama Malang)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015) 64.

putusan perkara nomor 1569/Pdt.G/2020/PA.Mlg. Skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap pengaruh penerapan SEMA Nomor 1 tahun 2017 huruf C poin 1 dalam perkara permohonan talak nomor 1569/Pdt.G/2020/PA.Mlg.

Jenis data yang akan digunakan ada 3 yakni sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer dalam skripsi ini adalah putusan nomor 1569/Pdt.G/2020/PA.Mlg. Putusan ini didapatkan melalui pencarian di website direktori putusan Mahkamah Agung dan sebagian data tidak tercantum karena pemeriksaan bersifat tertutup serta alasan privasi para pihak yang berperkara.<sup>15</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari literatur hukum dan hasil wawancara dengan salah seorang hakim yang merupakan majelis hakim dalam perkara nomor 1569/Pdt.G/2020/PA.Mlg

c. Data Tersier

Data tersier akan diambil dari kamus hukum serta ensiklopedia yang terkait.

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumen

---

<sup>15</sup> Lihat pasal 80 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Studi dokumen akan dilakukan dengan mempelajari putusan nomor 1569/Pdt.G/2020/PA.Mlg yang di dalam amar putusannya menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C Poin 1 sebagai pertimbangan hukum.

b. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai instrumen utama adalah data yang didapatkan dari narasumber penelitian maka data-data tersebut kemudian akan di cocokkan dengan sumber-sumber lain dari buku, penelitian terdahulu, atau perundang-undangan yang berlaku (manual dan digital).

c. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data oleh 2 orang atau lebih bertemu di mana salah satunya atau lebih merupakan penanya dan lainnya menjadi narasumber untuk melakukan tanya jawab terhadap suatu topik tertentu. Dari pengertian di atas sudah jelas bahwa dalam penelitian kali ini penulis akan melakukan tanya jawab untuk mengumpulkan data dari para narasumber guna mengetahui hal-hal yang sedang diteliti.

Narasumber pada penelitian ini adalah :

Nama : Drs. H. Masykur Rosih

NIP : 19600301.199303.1.001

Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 01 Maret 1960

Pangkat/Gol. Terakhir : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Malang (15  
Juni 2019)

Dalam penelitian ini, hasil wawancara akan menjadi data sekunder yang berfungsi sebagai validasi atas hal-hal yang tidak tertulis dalam putusan

### 3. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode analisa deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan penerapan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruf c poin 1 dalam putusan nomor 1569/Pdt.G/2020/PA.Mlg dan melakukan analisa berdasarkan pada teori-teori hukum yang berlaku.

### **G. Sistematika Pembahasan**

BAB I Pendahuluan berisikan latar belakang masalah yang dibahas, rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian, tujuan serta kontribusi penelitian dalam berbagai hal, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II Kajian Teori berisikan tinjauan teori-teori dari berbagai sumber yang berhubungan dengan skripsi yang disusun sebagai landasan teoritis dari penelitian yang akan dilakukan dan juga sebagai pemberi batasan serta gambaran tentang apa saja yang diteliti oleh penulis

BAB III Hasil Penelitian dan Analisa akan berisi hasil dari apa saja yang penulis dapatkan melalui proses penelitian baik melalui studi dokumen putusan dan perundang-undangan maupun proses wawancara kepada para Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, Bab ini juga akan berisi hasil analisa penulis terhadap bahan hukum yang sudah didapatkan.

BAB IV Penutup berisikan kesimpulan yang disusun penulis berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, bab ini juga berisi saran dan rekomendasi penulis terhadap objek penelitian.

